

Program Bantuan Pendidikan dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Indonesia: Perspektif Keadilan Sosial Islam

Fitri Habiba¹, Irhamna Irhamna², Ismi Azizatul Khikmah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: ¹fitrihabiba@gmail.com, ²irhamna63@gmail.com, ³ismayaziza77@gmail.com

Received:
18 Mei 2025

Revised:
26 Juni 2025

Accepted:
17 Juli 2025

Published:
13 Agustus 2025

ABSTRACT

Keywords:

Education Access;
Education
Assistance; Islamic
Social Justice; Public
Policy; Welfare

This study aims to analyze education assistance programs and their contribution to improving access to education in Indonesia from the perspective of Islamic social justice. Using a qualitative approach with a descriptive literature review, this study examines various government education assistance programs, including the School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah), the Smart Indonesia Card (Kartu Indonesia Pintar), and the Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar), as policy instruments to expand educational opportunities, particularly for students from economically disadvantaged families. Data were collected from scholarly articles, government reports, books, and other relevant publications and analyzed through thematic content analysis. The findings indicate that education assistance programs have contributed significantly to increasing school participation and reducing financial barriers to education. However, challenges remain regarding equitable distribution, transparency, implementation, and the quality of educational outcomes. From the perspective of Islamic social justice, these programs reflect the principles of equity, public welfare (maṣlaḥah), and the state's responsibility to ensure equal educational opportunities for all citizens. The study concludes that education assistance should not only be evaluated based on administrative effectiveness but also on its ability to promote distributive justice and social welfare in accordance with Islamic values.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Akses Pendidikan;
Bantuan Pendidikan;
Keadilan Sosial
Islam; Kebijakan
Publik;
Kesejahteraan
Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program bantuan pendidikan serta kontribusinya terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia dalam perspektif keadilan sosial Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari berbagai literatur, meliputi artikel ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang membahas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen perluasan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi efektivitas program, tantangan implementasi, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi hambatan ekonomi terhadap akses pendidikan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, antara lain ketepatan sasaran penerima, transparansi distribusi bantuan, efektivitas pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas pendidikan. Dalam perspektif keadilan sosial Islam, program bantuan pendidikan mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan (maṣlaḥah), dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, evaluasi program perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek administratif, tetapi juga pencapaian keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental setiap warga negara sekaligus investasi strategis dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan (Khoiruddin et al., 2024; Barnett-Itzhaki et al., 2025; Wibowo, 2025). Ketersediaan akses pendidikan yang merata tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, pendidikan menempati posisi sentral dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 4 yang menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat (Muslim et al., 2021; Widiyanti et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, komitmen tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusional tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif Islam, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi sarana membangun manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjalankan fungsi sebagai *khalifah* di muka bumi (Nurrahma et al., 2024). Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap pentingnya ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mujādilah ayat 11 mengenai kemuliaan orang-orang yang berilmu serta QS. Az-Zumar ayat 9 yang menegaskan perbedaan kedudukan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang mampu menjamin kesempatan belajar secara adil tanpa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial masyarakat.

Meskipun berbagai kebijakan pendidikan telah dikembangkan, pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan (Mahmud, 2022; Aminuddin et al., 2025; Rahmawati et al., 2025). Ketimpangan sosial ekonomi, disparitas pembangunan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat masih menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan peserta didik. Kondisi tersebut tercermin pada berbagai indikator pendidikan nasional, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata lama sekolah, dan angka putus sekolah yang menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan di beberapa kelompok masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tidak hanya memerlukan pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi juga kebijakan afirmatif yang mampu mengurangi hambatan ekonomi bagi kelompok masyarakat rentan.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas akses pendidikan, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program bantuan pendidikan, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Program-program tersebut dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan, meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta mencegah peserta didik dari keluarga kurang mampu mengalami putus sekolah. BOS berperan dalam mendukung pembiayaan operasional satuan pendidikan, sedangkan KIP dan PIP memberikan bantuan langsung kepada peserta didik agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Kehadiran berbagai program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan

KEBIJAKAN PENDIDIKAN bantuan pendidikan telah menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan (Lestari, 2020). Program Indonesia Pintar terbukti meningkatkan peluang peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah serta menekan angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa implementasi Kartu Indonesia Pintar berpengaruh terhadap meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia sekolah dari keluarga berpendapatan rendah. Di sisi lain, Bantuan Operasional Sekolah berkontribusi dalam mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan kebutuhan operasional sekolah (Kemendikbudristek, 2022). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa program bantuan pendidikan memiliki peran strategis dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas program bantuan pendidikan belum sepenuhnya terlepas dari berbagai permasalahan implementasi. Ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi distribusi bantuan, efektivitas pemanfaatan dana, serta kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Selain itu, sebagian besar evaluasi terhadap program bantuan pendidikan masih berorientasi pada aspek administratif dan capaian kuantitatif, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah atau jumlah penerima bantuan. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan publik juga perlu dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif keadilan sosial Islam, kebijakan bantuan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai instrumen fiskal untuk mengurangi biaya pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap pendidikan yang layak. Prinsip *al-'adālah*, *maṣlahah*, *takāful ijtīmā'ī* (solidaritas sosial), dan *amanah* menjadi landasan etik yang menegaskan bahwa distribusi sumber daya publik harus dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak kepada kelompok yang membutuhkan (Kamilah et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan program bantuan pendidikan tidak hanya diukur dari peningkatan akses pendidikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghadirkan keadilan distributif dan memperkecil kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas efektivitas Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, maupun Bantuan Operasional Sekolah dari perspektif kebijakan publik, ekonomi pendidikan, atau evaluasi program. Kajian yang mengintegrasikan evaluasi program bantuan pendidikan dengan perspektif keadilan sosial Islam masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada efisiensi administratif, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program bantuan pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan di Indonesia melalui perspektif keadilan sosial Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif keadilan sosial Islam sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi kebijakan bantuan pendidikan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian pendidikan Islam sekaligus memperkaya diskursus mengenai kebijakan pendidikan yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau kajian pustaka. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi program bantuan pendidikan di Indonesia serta menganalisisnya dalam perspektif keadilan sosial Islam (Baxter & Jack, 2008; Creswell & Poth, 2023). Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber yang relevan, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang membahas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), pemerataan akses pendidikan, dan konsep keadilan sosial dalam Islam. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah yang kredibel dan mutakhir agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kebijakan bantuan pendidikan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai literatur sesuai fokus penelitian (Ahmed, 2024; Almusaed et al., 2025). Seluruh sumber kemudian dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta kontribusinya terhadap pembahasan mengenai efektivitas program bantuan pendidikan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* melalui proses reduksi data, pengelompokan informasi berdasarkan tema-tema utama, interpretasi hasil, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018; Ahmed et al., 2025). Tema-tema yang dianalisis meliputi implementasi program bantuan pendidikan, peningkatan akses pendidikan, distribusi bantuan, tantangan pelaksanaan program, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis literatur, seperti artikel ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, dan laporan lembaga internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan objektivitas hasil penelitian sekaligus meminimalkan bias interpretasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai kontribusi program bantuan pendidikan terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia serta menjelaskan relevansinya dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Program Bantuan Pendidikan terhadap Peningkatan Akses Pendidikan

Program bantuan pendidikan merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Melalui berbagai skema bantuan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah berupaya mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga diarahkan untuk menjamin kesempatan belajar yang lebih merata bagi seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi sosial ekonomi.

Peningkatan akses pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan program bantuan pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa implementasi berbagai program bantuan pendidikan berkontribusi terhadap penurunan angka putus sekolah dan meningkatnya partisipasi pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan (Triono & Sangaji, 2023; BPS, 2023). Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

melaporkan bahwa implementasi BOS dan KIP mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, dengan peningkatan partisipasi pendidikan dasar mencapai sekitar 15% sejak program tersebut dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pendidikan mampu mengurangi hambatan finansial yang selama ini menjadi faktor utama rendahnya akses pendidikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Program Bantuan Operasional Sekolah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung operasional satuan pendidikan. Dana BOS memungkinkan sekolah memenuhi berbagai kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan, seperti penyediaan sarana pembelajaran, pengadaan buku, pemeliharaan fasilitas, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan. Ketersediaan dukungan pembiayaan tersebut secara tidak langsung memperluas kapasitas sekolah dalam menerima peserta didik sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua. Program BOS memberikan dampak positif terhadap penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih memadai sehingga mendukung peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selain BOS, Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan yang diberikan mampu mengurangi risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan peluang peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, program bantuan pendidikan tidak hanya meningkatkan akses masuk ke lembaga pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlangsungan proses pendidikan hingga peserta didik menyelesaikan masa belajarnya.

Meskipun demikian, peningkatan akses pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat program di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, keterbatasan informasi mengenai mekanisme program, serta perbedaan kapasitas pengelolaan pada tingkat satuan pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas program bantuan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat (Maryam et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan tidak hanya memerlukan keberlanjutan program bantuan, tetapi juga perbaikan tata kelola agar distribusi manfaat dapat menjangkau seluruh peserta didik yang berhak menerimanya.

Dari perspektif keadilan sosial Islam, peningkatan akses pendidikan merupakan wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan (Saputra, 2021). Islam memandang pendidikan sebagai instrumen penting dalam membangun kualitas manusia sekaligus mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kebijakan bantuan pendidikan tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi moral yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab menghadirkan kesempatan belajar secara adil bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, keberhasilan program bantuan pendidikan tidak hanya diukur melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga melalui kemampuannya mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarkelompok masyarakat sehingga nilai keadilan sosial dapat diwujudkan secara lebih nyata.

Tantangan Implementasi Program Bantuan Pendidikan

Meskipun berbagai program bantuan pendidikan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan

dengan aspek administratif, tetapi juga mencakup tata kelola, akuntabilitas, pemerataan distribusi bantuan, serta kualitas pengelolaan program pada tingkat satuan pendidikan. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, koordinasi antarlembaga, dan sistem pengawasan yang mampu menjamin penyaluran bantuan secara tepat sasaran.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan adalah proses birokrasi yang relatif kompleks. Mekanisme administrasi yang panjang sering kali menyebabkan keterlambatan penyaluran dana kepada sekolah maupun peserta didik. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya operasional sekolah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang bergantung pada dana bantuan pemerintah. Keterlambatan penyaluran juga berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu karena bantuan tidak diterima pada waktu yang dibutuhkan.

Selain permasalahan birokrasi, keterbatasan informasi mengenai mekanisme program masih menjadi kendala yang dihadapi sebagian masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai Kartu Indonesia Pintar menyebabkan masih banyak orang tua yang belum memahami prosedur pendaftaran, persyaratan penerima manfaat, maupun mekanisme pemanfaatan bantuan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima bantuan belum dapat mengakses program secara optimal. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mulai memperluas strategi sosialisasi melalui media digital, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta pelibatan tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program bantuan pendidikan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperluas jangkauan program kepada kelompok sasaran yang membutuhkan. Implementasi Kartu Indonesia Pintar telah membantu banyak peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek pelaksanaannya.

Permasalahan lain yang masih sering ditemukan adalah kurangnya transparansi dalam proses distribusi dan pemanfaatan dana bantuan pendidikan. Pada beberapa kasus, sekolah maupun orang tua peserta didik belum memperoleh informasi yang memadai mengenai besaran bantuan yang diterima, mekanisme penyaluran, maupun penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Keterbatasan informasi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana, mengurangi akuntabilitas pengelolaan program, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa program bantuan pendidikan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas program bantuan pendidikan juga dipengaruhi oleh sistem pengawasan yang belum berjalan secara optimal. Berbagai laporan menunjukkan masih ditemukannya penggunaan dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukannya sehingga manfaat program belum dapat dirasakan secara maksimal oleh peserta didik. Pengawasan yang lemah tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga berpotensi memperbesar kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah. Penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan transparansi merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa dana bantuan benar-benar dimanfaatkan bagi peningkatan mutu layanan pendidikan. Sejalan dengan itu, Choiri et al. (2025) menyatakan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Indonesia dapat diminimalkan apabila

implementasi program bantuan dilakukan secara lebih merata, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi program bantuan pendidikan tidak dapat hanya berfokus pada peningkatan jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang disalurkan. Evaluasi juga harus mempertimbangkan kualitas tata kelola program, efektivitas distribusi bantuan, serta dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan. Dengan demikian, penguatan koordinasi antarlembaga, digitalisasi sistem penyaluran bantuan, peningkatan kapasitas pengelola program, serta pengawasan yang lebih akuntabel menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan bantuan pendidikan di Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan program bantuan pendidikan tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai kebijakan yang berkontribusi terhadap terciptanya sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.

Program Bantuan Pendidikan dalam Perspektif Keadilan Sosial Islam

Program bantuan pendidikan merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dalam perspektif keadilan sosial Islam, kebijakan publik tidak hanya dinilai berdasarkan efektivitas administratif atau capaian kuantitatif, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan pemerataan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dipahami sebagai implementasi tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Prinsip keadilan (*al-'adālah*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menuntut adanya perlakuan yang proporsional terhadap seluruh anggota masyarakat. Keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pemberian yang sama kepada setiap individu, tetapi sebagai upaya memberikan hak sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dalam konteks pendidikan, prinsip tersebut diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi agar memperoleh kesempatan belajar yang setara. Dengan demikian, program bantuan pendidikan merupakan bentuk distribusi sumber daya publik yang bertujuan memperkecil kesenjangan akses pendidikan sekaligus menciptakan pemerataan kesempatan belajar.

Selain keadilan, Islam juga menempatkan konsep *maṣlahah* sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik (Munawaroh, 2023; Zamroni et al., 2023; Rafiuddin et al., 2024). Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mengurangi berbagai bentuk kemudatan. Program bantuan pendidikan memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip tersebut karena berupaya mengurangi hambatan ekonomi yang menyebabkan anak-anak tidak dapat mengakses pendidikan. Melalui bantuan pembiayaan pendidikan, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap peserta didik memperoleh kesempatan mengembangkan potensi intelektual dan sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas program bantuan pendidikan tidak hanya diukur melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga melalui kemampuannya menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perspektif keadilan sosial Islam juga menempatkan negara sebagai pemegang amanah (*amanah*) dalam mengelola sumber daya publik (Anggreini & Waspada, 2020; Siregar et al., 2024; Sarmigi & Wahyuni, 2025). Dana pendidikan yang dialokasikan melalui berbagai program

bantuan merupakan amanah yang harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip *amanah* menghendaki agar seluruh proses perencanaan, distribusi, pelaksanaan, hingga evaluasi program dilakukan secara profesional serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, berbagai permasalahan yang masih ditemukan dalam implementasi program bantuan pendidikan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan distribusi, maupun lemahnya pengawasan, perlu dipandang sebagai tantangan yang harus segera diperbaiki agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Di samping itu, konsep *takāful ijtimā'ī* atau solidaritas sosial memberikan landasan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Pendidikan tidak hanya menghasilkan manfaat bagi individu, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, program bantuan pendidikan harus dipahami sebagai investasi sosial jangka panjang yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan, produktif, dan berdaya saing. Semakin luas akses masyarakat terhadap pendidikan, semakin besar pula peluang terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika dianalisis berdasarkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, program bantuan pendidikan memiliki relevansi yang sangat kuat, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan akal (*hifẓ al-'aql*). Pendidikan merupakan instrumen utama dalam membangun kualitas intelektual manusia sehingga setiap kebijakan yang memperluas kesempatan memperoleh pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat (Auda, 2013; Kamali, 2019). Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan juga berkontribusi terhadap perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat dan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) melalui terbentuknya generasi yang berilmu, berkarakter, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, program bantuan pendidikan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi dan sosial, tetapi juga mengandung dimensi religius yang sejalan dengan tujuan dasar syariat Islam.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Namun demikian, efektivitas program masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pemerataan distribusi, transparansi pengelolaan dana, peningkatan akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan (Donath et al., 2023; Fatmawati et al., 2023; Damiani & Fraillon, 2025). Dalam perspektif keadilan sosial Islam, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari meningkatnya jumlah penerima bantuan, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan keadilan distributif, memperkecil kesenjangan pendidikan, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas program bantuan pendidikan di Indonesia.

KESIMPULAN

Program bantuan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Pintar (PIP) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah, pengurangan hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan, serta perluasan kesempatan belajar pada berbagai jenjang pendidikan. Meskipun demikian, efektivitas program masih

menghadapi berbagai tantangan, seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, transparansi distribusi bantuan, efektivitas pengelolaan dana, serta penguatan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola program yang mampu menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dalam perspektif keadilan sosial Islam, program bantuan pendidikan mencerminkan implementasi nilai-nilai *al-'adālah* (keadilan), *maṣlaḥah* (kemaslahatan), *amanah* (tanggung jawab), dan *takāful ijtimā'ī* (solidaritas sosial) dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Program bantuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan pendidikan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jika ditinjau berdasarkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung *ḥifẓ al-'aql* melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan perlu diukur tidak hanya melalui indikator administratif, tetapi juga melalui kemampuannya mewujudkan keadilan distributif dan kemanfaatan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan evaluasi program bantuan pendidikan ke dalam perspektif keadilan sosial Islam, sehingga memperluas kajian mengenai kebijakan pendidikan dari aspek administratif menuju pendekatan yang lebih etis dan normatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola program bantuan pendidikan melalui peningkatan akurasi penetapan penerima manfaat, transparansi distribusi dana, pengawasan yang lebih efektif, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui survei atau *mixed methods* guna mengukur secara lebih komprehensif pengaruh program bantuan pendidikan terhadap pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan perspektif keadilan sosial Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1). <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2024.100051>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khahir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.gmedi.2025.100198>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Aminuddin, Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal*

- Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676.
<https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I2.7914>
- Anggreini, C., & Waspada, I. (2020). Kajian Literasi Ekonomi Siswa Sekolah Menengah Atas Amanah Ciwidey. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 2(1).
<https://doi.org/10.29300/ijss.v2i1.2731>
- Auda, J. (2013). Al-Maqashid untuk Pemula. In *Filsafat Hukum Islam*. Suka Press.
- Barnett-Itzhaki, Z., Tifferet, S., Etstein, Y., Gefen, I., Ravid, O., Barokas, G., Vilnai-Yavetz, I., Carasso Romano, G. H., & Levi, A. (2025). A Holistic Approach to Sustainability in Higher Education Institutes: Social, Economic, Educational, and Mobility Perspectives. *Frontiers in Education*, 10, 1588223. <https://doi.org/10.3389/FEDUC.2025.1588223/FULL>
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559.
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. BPS.Go.Id.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Choiri, A., Wibowo, W., Arifa, I., & Aminuddin. (2025). Dampak Pengangguran dan Ketimpangan Sosial terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, dan Politik di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 947–955. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V4I3.7893>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 5th Edition*. 552.
- Damiani, V., & Fraillon, J. (2025). Civic and Citizenship Education, Global Citizenship Education, and Education for Sustainable Development: An Analysis of Their Integrated Conceptualization and Measurement in the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 and 2022. *Large-Scale Assessments in Education*, 13(1), 3-.
<https://doi.org/10.1186/S40536-025-00237-Y>
- Donath, J. L., Lüke, T., Graf, E., Tran, U. S., & Götz, T. (2023). Does Professional Development Effectively Support the Implementation of Inclusive Education? A Meta-Analysis. *Educational Psychology Review*, 35(1), 30-. <https://doi.org/10.1007/S10648-023-09752-2>
- Fatmawati, E., Suharto, B., Dahlan, M., Suhma, W. K., & Yudiawan, A. (2023). Challenges of Educational Management in the Islamic Higher Education Sector Based on Pesantren. *Journal of Educational and Social Research*, 13(6), 105–118.
<https://doi.org/10.36941/JESR-2023-0151>
- Kamali, M. H. (2019). *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple*. IIIT. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-made-simple/>
- Kamilah, S. W., Mansur, S., & Kurni, W. (2025). Amanah sebagai Pilar Etika Qur'ani: Kajian Tematik terhadap Ayat-Ayat Tanggung Jawab Moral. *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 3(2), 307–318. <https://doi.org/10.70292/JPCPV3I2.202>

- Kemendikbudristek. (2022). *Pusat Asesmen Pendidikan*.
<https://pusmendik.kemdikbud.go.id/produk/kategori-asesmen-terstandar/page-frame-work-asesmen-kompetensi-minimal>
- Khoiruddin, M. A., Setyanti, A. M., Suman, A., Prasetyia, F., & Susilo, S. (2024). Exploring Determinants of Education-Job Mismatch Among Educated Workers in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 25(2), 263–281.
<https://doi.org/10.23917/JEP.V25I2.23994>
- Lestari, P. (2020). Peran Modal Sosial dalam Membentuk Karakter Siswa di SDIT Salman Al Farisi 2 Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 62–71.
<https://doi.org/10.21831/SAKPV9I1.17036>
- Mahmud, R. (2022). Pendidikan Islam dalam Mengatasi Problema dan Tantangan Pembangunan Nasional. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21(2).
<https://doi.org/10.31293/pd.v21i2.6457>
- Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki dan Mustahik pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 492–500.
<https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.723>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Munawaroh, M. (2023). Peran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi pada LAZISNU Kecamatan Cluring. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 331–340.
<https://doi.org/10.59059/MASLAHAH.V1I3.1665>
- Muslim, Abd. Q., Suci, I. G. S., & Pratama, M. R. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan di Jepang, Finlandia, China dan Indonesia dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 6(2). <https://doi.org/10.25078/aw.v6i2.2827>
- Nurrahma, S. A., Rahma, T. I. F., & Tambunan, K. (2024). Analisis Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah, Tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Aceh. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 94–115. <https://doi.org/10.59841/JUREKSI.V2I2.1116>
- Rafiuddin, M., Aulia Ramadhan, D., Nur Azizah, S., Sunan Kalijaga Yogyakarta, U., & mhmdrafdin, I. (2024). Halal Certification for MSMEs: Navigating Perceptions and Implementations Through the Lens of Maslahah Mursalah. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 135–151. <https://doi.org/10.52593/MTQ.05.2.03>
- Rahmawati, Y., Mu'ti, A., Suyanto, S., & Herianingtyas, N. L. R. (2025). Pembelajaran Mendalam: Transformasi Pembelajaran Menuju Pendidikan Bermutu. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 18(1). <https://doi.org/10.24832/JPKPV18I1.1281>

- Saputra, W. (2021). Keadilan Distributif dalam Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Perspektif Asghar Ali Engginer. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.276>
- Sarmigi, E., & Sri Wahyuni, E. (2025). The Amānah of Governance: Internal Control, Islamic Organizational Culture, and Fraud Risk Mitigation. *TSAQAFAH*, 21(2), 80–107. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v21i2.36>
- Siregar, T. R. S., Ramdhansyah, R., & Setiana, E. (2024). Akuntabilitas Pesantren: Interaksi Keberadaan Pedoman Akuntansi Pesantren dan Nilai Amanah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 168–188. <https://doi.org/10.21043/AKTSAR.V7I2.29003>
- Wibowo, W. (2025). Integrasi Literasi Finansial dalam Kurikulum Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 78–85. <https://doi.org/10.58472/JIPSH.V1I1.29>
- Widiyanti, D., Fadila, D., Pratiwi, N., & Rachman, I. F. (2024). Peran Literasi Digital pada Siswa Sekolah Dasar untuk Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(3), 142–155. <https://doi.org/10.61132/MORFOLOGI.V2I3.626>
- Zamroni, M. A., Toha, M., Zuana, M. M. M., & Isbahi, M. B. (2023). Exploring Zakat Distribution Via Blockchain in Indonesia Perspective of Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 6(3), 3544–3555. <https://doi.org/10.31538/IJSE.V7I3.5821>